

# **LAPORAN TAHUNAN**

**PENGELOLAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UNIT PELAKSANA BPTP LAMPUNG**

¶



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN LAMPUNG  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2022**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

1. Judul ROKTM : Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana BPTP Lampung
2. Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Z.A. Pagar Alam No.Ia Rajabasa Bandar Lampung
4. Sumber Dana : DIPA BPTP Lampung TA 2022
5. Status Kegiatan (L/B) : Baru
6. Penanggung Jawab :
  - a. Nama : Edwin Herdiansyah, SP
  - b. Pangkat/Golongan : Penata TK I/III d
  - c. Jabatan : Sub Koordinator KSPP
7. Lokasi : Provinsi Lampung
8. Agroekosistem : -
9. Tahun mulai : 2022
10. Tahun selesai : 2022
11. Output Tahunan : Terlaksananya pelayanan informasi dan dokumentasi unit kerja BPTP Lampung
12. Output Akhir : Terlaksananya pelayanan informasi dan dokumentasi unit kerja BPTP Lampung kepada masyarakat.
13. Biaya : -

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Oleh karena itu BPTP Lampung sebagai badan publik wajib menyediakan layanan informasi publik. BPTP Lampung sendiri sebagai PPID Pelaksana UPT yang pelaksanaannya di koordinir oleh KSPP BPTP Lampung.

Oleh karena itu, BPTP Lampung sebagai badan publik yang bergerak dibidang Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengembangkan layanan informasi publik. Layanan informasi publik lebih murah dan efisien melalui online melalui sistem informasi melalui media teknologi informasi (TI). Salah satu model TI yang berkembang pesat adalah internet (Febrian,2005). Sejalan dengan perkembangan TI melalui internet, data dan informasi lebih mudah disampaikan dalam bentuk yang teridentifikasi, efektif, efisien dan berkesinambungan. Saat ini internet merupakan satu alat penting untuk memperoleh informasi yang cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2004a; Satyalesmana, 2004). Penggunaan internet dapat mempersingkat jarak dan waktu transfer teknologi kepada stakeholders.

Di Indonesia sendiri per tanggal 31 Desember 2007, pengguna internet berjumlah sekitar 20 juta, dengan pertumbuhan pengguna dari tahun 2000 hingga 2007 sekitar 900% dan penetrasinya baru 8.5% dari jumlah penduduk ([www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com)). Hal tersebut memungkinkan layanan informasi publik BPTP maupun Badan Litbang lebih mudah diketahui orang lain. Penggunaan model internet tersebut memberikan informasi dan diseminasi dari institusi pemerintah yang lebih cepat dan pelayanan akan lebih baik untuk pengguna (Sankanto, 2004; Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2004b).

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung, yang merupakan institusi pemerintah berkewajiban memberikan layanan informasi khususnya yang berhubungan dengan hasil teknologi spesifik lokasi Provinsi Lampung ke pengguna. Sejalan dengan itu maka, perlu adanya fasilitas Web site dan E-mail di internet yang merupakan alat untuk digunakan sebagai upaya diseminasi hasil pengkajian dan pelayanan langsung ke masyarakat luas.

Untuk mendukung fungsi BPTP sebagai lembaga penelitian dan pengkajian di daerah, dimana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung harus dapat menjadi institusi yang mampu memberikan masukan dalam membantu mengarahkan pembangunan pertanian di daerah. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian juga harus segera merespons permasalahan-permasalahan di sektor pertanian yang muncul di daerah. Dilain pihak dalam era otonomi daerah dukungan dari berbagai khalayak di daerah seperti petani, penyuluh pertanian, dan penentu kebijakan pembangunan pertanian ditingkat legislatif dan eksekutif/pemda termasuk instansi terkait lingkup pertanian akan menentukan eksistensi BPTP di daerah (Sulaiman, 2002).

## **1.2 Dasar Pertimbangan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi.

BPTP Lampung sebagai badan publik melakukan layanan informasi publik pada masyarakat memaanfaatan layanan baik secara langsung maupun online. Melalui saluran komunikasi yang tepat dengan memperhatikan kondisi, sistem nilai, dan kebiasaan petani, suatu inovasi teknologi dapat disebarluaskan dari sumber teknologi kepada petani dan pengguna teknologi lainnya (Harsono, 1991).

## **1.3. Tujuan Tahunan**

Tujuan kegiatan Pengelolaan PPID BPTP Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan pengelolaan Informasi dan dokumentasi BPTP Lampung
2. Mendokumentasikan data informasi badan publik BPTP Lampung
3. Menyusun organisasi dan tata kerja serta SOP Pelayanan PPID

## **1.4. Keluaran Tahunan**

1. Tersedianya layanan masyarakat pengelolaan Informasi dan dokumentasi BPTP Lampung
2. Terdokumentasinya data informasi publik BPTP Lampung
3. Tersusunnya organisasi dan tata kerja serta SOP Pelayanan PPID

## **1.5 Perkiraan Manfaat dan Dampak**

Tersedianya layanan informasi publik dari lembaga Negara BPTP Lampung dan tersedianya dokumentasi pelaksanaan badan publik BPTP Lampung secara rapi dan teratur.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet, yaitu: 1) Informasi untuk kehidupan pribadi: kesehatan, rekreasi, hobby, pengembangan pribadi, rohani, sosial dan 2) Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja: sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi.

Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia (Purwanto, 2008).

Situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link.

Informasi dan komunikasi menempati posisi sentral dalam mempromosikan atau menyampaikan teknologi hasil penelitian dan pengkajian kepada pengguna. Hal ini dimungkinkan karena sebaik apapun teknologi yang dihasilkan tanpa diinformasikan dan dikomunikasikan kepada khalayak pengguna hanya sia-sia belaka, karena tidak diketahui apalagi dimanfaatkan oleh pengguna. Terbatasnya jumlah dan jenis media komunikasi yang digunakan dalam penyebaran teknologi juga mempengaruhi lambatnya adopsi teknologi oleh petani dan pengguna lainnya. Melalui saluran komunikasi yang tepat dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan budaya petani, suatu inovasi teknologi dapat disebarluaskan dari sumber teknologi kepada petani dan pengguna lainnya. Materi informasi yang akan disampaikan kepada pengguna dengan menggunakan berbagai metode dan media komunikasi yang menarik, mudah dimengerti dan dipahami.

### **III. METODOLOGI**

#### **3.1 Pendekatan**

Pengelolaan PPID BPTP Lampung dilakukan oleh operator dengan mengumpulkan dan dokumentasi baik bahan hasil penelitian dan data pelaksanaan badan publik BPTP Lampung sesuai dengan undang undang RI NO. 14 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pelaksanaan PPID menggunakan fasilitas komputer dan jaringan internet. Diharapkan pelayanan informasi publik terlaksana melauai online atau langsung, sehingga masyarakat dapat melaksanakannya.

#### **3.2 Ruang Lingkup Kegiatan**

Tahapan pertama, kegiatan dimulai dengan pengumpulan data dan Informasi publik yang dimiliki BPTP Lampung. Data didokumentasikan dalam computer, hardisk.

Tahapan kedua, data, informasi publik diseleksi yang akan dimasukan dalam website/aplikasi bagian PPID. Seleksi dan evaluasi dilakukan untuk memilah data dan informasi public di BPTP Lampung di simpan dalam bentuk soft copy.

Tahapan ketiga, yang merupakan pelaksanaan layanan informasi melalui online dan langsung. Data publik diupdate sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah pelaporan hasil kegiatan dalam bentuk tercetak.

Pada tahun 2022, pekerjaan PPID terfokus pada pendokumentasian data, updating dan penyediaan layanan informasi publik.

#### **3.3. Bahan/Alat dan Metode Pelaksanaan Kegiatan**

##### **3.3.1. Bahan/Alat**

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BPTP Lampung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Bahan dan Alat yang digunakan diantaranya seperangkat komputer, computer display, laptop, jaringan internet, scanner, printer, flash disk, hardisk eksternal, alat tulis, internet konektor, fotocopy. Berikut kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022.

##### **3.3.2. Metode Pelaksanaan Kegiatan**

Tahapan kegiatan meliputi:

1. Pembuatan proposal dan rencana anggaran biaya yang berada dalam satu judul kegiatan Web, perpustakaan dan PPID.
2. Pelaksanaan kegiatan:
  - a. Pengambilan data dan informasi layanan publik

- b. Pendokumentasian layanan publik
- c. Pelayanan layanan publik melalui online
- d. pelayanan informasi dan dokumentasi secara langsung
- e. Pembaharuan/update data dan informasi publik

### 3. Pelaporan

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Oleh karena itu BPTP Lampung sebagai badan publik wajib menyediakan layanan informasi publik. BPTP Lampung sendiri sebagai PPID Pelaksana UPT yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Sub Koordinator KSPP.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Lampung memiliki portal PPID (<http://bptp-lampung.ppid.pertanian.go.id>) yang aksesnya langsung ke Portal PPID Utama Kementerian mempunyai tujuan mulia antara lain: terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, serta mudah diakses. Transparansi kinerja tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan, DIPA, Renstra, RKT, LAKIP dan Capaian Kinerja.

- Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan / instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.
- Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah.
- RKT merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam dokumen PK.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana

tahunan yang telah disusunnya. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP.

- Capaian Kinerja yaitu pemantauan dilakukan guna melihat sejauh mana tingkat capaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK). Pemantauan capaian kinerja ini dilakukan menyajikan data dan informasi kinerja secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

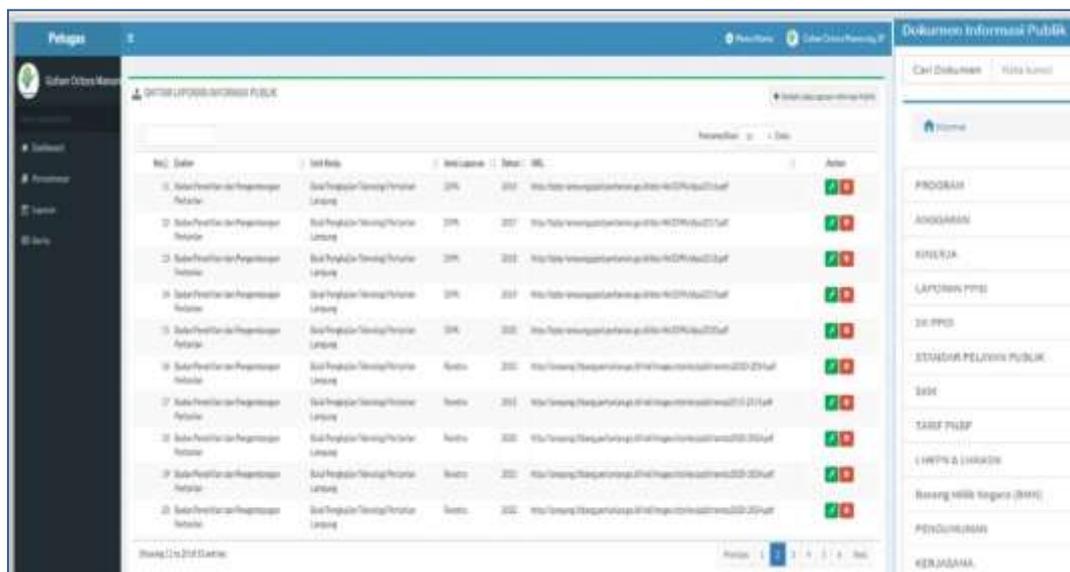
Kelengkapan data di Portal PPID dimonitoring secara rutin setiap tahun karena menjadi dasar dalam penilaian keterbukaan informasi publik baik lingkup Balitbangtan maupun Kementan. Pada tahun ini Kementan memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Peringkat Satu Anugerah KIP sebagai Kluster Tertinggi "Informatif". Hal tersebut adalah bentuk kerja bersama dari seluruh UK/UPT lingkup Kementan dalam terwujudnya transparansi kinerja dan keterbukaan informasi publik.



Gambar 1. Layanan PPID di tampilkan pada website BPTP Lampung



Gambar 2. Tampilan Portal PPID BPTP Lampung



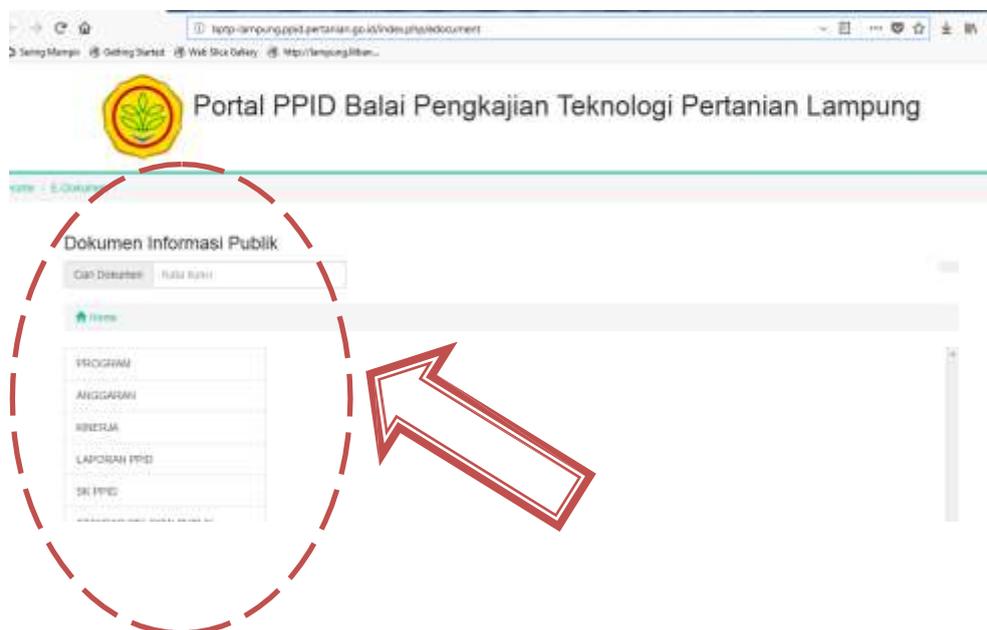
## Aplikasi PPID

Aktivitas layanan PPID dilaksanakan secara online dan offline. Pelaksanaan PPID secara online melalui aplikasi PPID yang disediakan khusus oleh Kementerian Pertanian. BPTP Lampung memiliki portal PPID pada alamat Url : <http://bptp-lampung.ppid.pertanian.go.id>. Portal PPID telah dikelola oleh Tim PPID untuk menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi PPID memiliki beberapa menu yang terdiri dari :

1. Registrasi Silayan
2. Silayan Online

3. E Dokumen
4. Tata Cara Permohonan
5. Link Website Eselon I
6. Laporan PPID
7. Rekapitulasi
8. Link PPID
9. Informasi Publik
10. Kontak Kami
11. SKM

Pada sebelas menu ini dapat melihat aplikasi dan tayangan PPID BPTP Lampung. Menu E-dokumen berisi data-data informasi dan dokumentasi BPTP Lampung yang diisi oleh petugas Sidado. Pada aplikasi ini ada dua buah user name dan password yang diberikan pada tim PPID BPTP Lampung yaitu untuk Petugas Silayan & Sidado, dan Pejabat PPID. Username ini telah digunakan dan dikelola dalam pengelolaan aplikasi PPID BPTP Lampung. Petugas PPID hanya dapat mengisi aplikasi silayan dan sidado sedangkan Pejabat PPID memiliki username dan pasword khusus. Tampilan portal PPID BPTP Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.



Data E-Dokumen yang ditampilkan pada aplikasi PPDI Sidado (aplikasi data dan Dokumentasi) telah diisi untuk dapat dimanfaatkan masyarakat. Data dan menu E-Dokumen yang dibuat yaitu data SK PPID, Laporan PPID, Program, Anggaran, Kinerja, Anggaran, DIPA. SK PPID terdiri dari SK PPID Pelaksana UPT, dan SK PPID. Laporan PPID

terdiri dari laporan tahunan dan bulanan PPID. Menu Kinerja terdiri dari Lakin dan Laporan tahunan. Menu Anggaran terdiri dari DIPA dan Laporan Keuangan, sedangkan Menu Program terdiri dari Renstra dan Rencana Program.

### Data Permohonan Informasi

Jumlah Permohonan Informasi Publik, Keberatan, Tahun 2022 sebagaimana Tabel 1., Rekapitulasi Jumlah Permohonan Pelayanan Tahun 2022, terdapat 2 orang yang melakukan permohonan informasi publik Melalui Aplikasi Silayan. Terhadap permohonan di Silayan selanjutnya belum dapat ditindaklanjuti karena pemohon belum mencantumkan identitas diri pemohon.

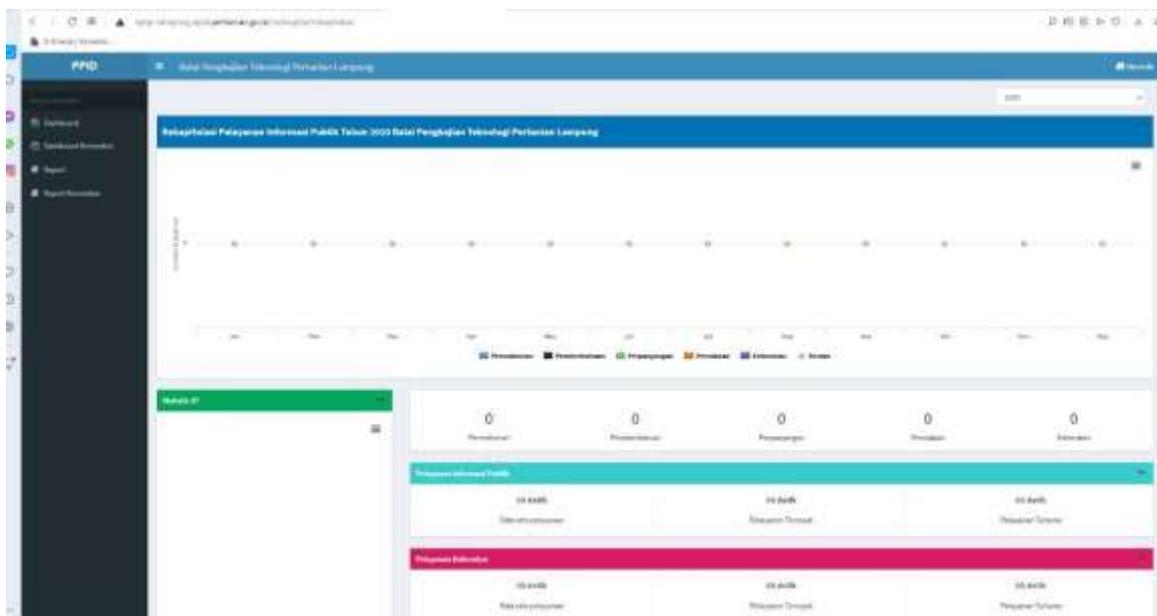
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Pelayanan Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Pelayan		
		Lab	PKL	Informasi
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	14	3	6
4	April	0	0	10
5	Mei	79	0	0
6	Juni	17	20	12
7	Juli	0	2	23
8	Agustus	106	0	14
9	September	0	9	25
10	Oktober	0	10	16
11	November	0	0	10
12	Desember	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>216</b>	<b>44</b>	<b>116</b>

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Keberatan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>

Permohonan informasi publik yang dilakukan PPID pelaksana UPT BPTP Lampung pada tahun 2022 menunjukkan bahwa seluruh permohonan lebih banyak masuk melalui Aplikasi SILAYAN online dibanding dengan email, telepon, on visit, dan surat. Aplikasi SILAYAN online ini lebih memudahkan pelaksanaan layanan informasi dimana data permohonan langsung terinput dalam aplikasi ini.



Gambar 5. Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Aplikasi SILAYAN tahun 2022

### Sarana Dan Prasarana PPID Pelaksana UPT BPTP Lampung

Gambaran kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Lampung, sebagai berikut. 1) Kantor BPTP Lampung di

Lantai 1 sudah tersedia ruangan khusus pelayanan informasi (Desk Pelayanan) dengan pertimbangan untuk memudahkan pemohon informasi. Selain itu, Ruang Perpustakaan serta KSPP juga disiapkan untuk melayani permohonan informasi.

Pada Desk Layanan dilakukan pembuatan nama papan Desk /counter informasi PPID dilengkapi dengan poster roll banner maklumat hak informasi publik, alur layanan informasi public, struktur PPID, dll. Sarana pendukung PPID BPTP Lampung masih berada diruang KSPP yang dilengkapi dengan 1 (satu) set kursi penerima tamu, 1 (satu) perangkat komputer terkoneksi dengan jaringan internet , 1 (satu) unit printer warna, 1 (satu) unit scanner, buku tamu, formulir pelayanan, leaflet, dan alat tulis.



Gambar 7. Poster Roll Banner PPID Pelaksana UPT BPTP Lampung

BPTP Lampung menyediakan informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat. BPTP Lampung menyediakan jalur evakuasi berupa tangga darurat dan titik kumpul. Berikut gambar jalur Evakuasi Darurat:



Gambar 8. Informasi Prosedur Evakuasi PPID UPT BPTP Lampung

### **Pendokumentasian Informasi PPID**

BPTP Lampung juga menyediakan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik Manual Berikut Gambar penyimpanan dan pendokumentasian Informasi publik Manual:



Gambar 9. Dokumen PPID UPT BPTP Lampung

BPTP Lampung juga menyediakan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik Digital. Berikut gambar penyimpanan dan pendokumentasian Informasi publik Digital seperti CD, Flashdisk, dll:



Gambar 10. Dokumen PPID UPT BPTP Lampung

### **Public Hearing**

Public Hearing dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2019 di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung yang membahas tentang 7 Standar Pelayanan Publik (SPP). SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPTP Lampung yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan secara optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan. Standar Pelayanan Publik pada BPTP Lampung meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi
- b. Teknologi Pertanian
- c. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
- d. Pelayanan Perpustakaan
- e. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
- f. Pelayanan Kunjungan Umum, Kunjungan Dinas dan Eduwisata
- g. Pelayanan Jasa Narasumber, Instruktur dan Juri Kontes
- h. Pelayanan Jasa Analisa Laboratorium

## **V. KESIMPULAN**

Kegiatan Layanan Informasi PPID Pelaksana UPT BPTP Lampung telah dilaksanakan tahun 2022 dan dapat disimpulkan bahwa :

1. Aktivitas layanan PPID dilaksanakan secara online dan offline.
2. BPTP Lampung telah melakukan layanan PPID melalui aplikasi PPID yang disediakan khusus oleh Kementerian Pertanian. Aplikasi data dan Dokumentasi (Sidado) telah diisi data informasi publik BPTP Lampung.
3. Permohonan Pelayanan Publik Tahun 2022 adalah 376 permohonan.
4. Sarana dan prasarana PPID tahun 2022 telah diperbahuri cetak ulang berupa poster roll banner maklumat hak informasi publik, alur layanan informasi publik, struktur PPID, dan Maklumat Pelayanan PPID.
5. BPTP Lampung menyediakan jalur evakuasi berupa tangga darurat dan titik kumpul.
6. Informasi Pendokumentasi PPID UPT BPTP Lampung secara manual dan digital.
7. BPTP Lampung telah melakukan Public Hearing pada 7 Standar Pelayanan Publik (SPP) pada tanggal 23 Mei 2019.

## VI. ANALISIS RISIKO

### DAFTAR RISIKO

No.	Risiko	Penyebab	Dampak
1	Data dan dokumentasi masih tersebar dan belum terkategori yang bisa diakses publik	Banya data dan dokumentasi tersebar dan belum terkategori	Data dan dokumentsi belum tersedia maksimal

### DAFTAR PENANGANAN RISIKO

No.	Risiko	Penyebab	Dampak	Upaya Penanganan
1	Data dan dokumentasi masih tersebar dan belum terkategori yang bisa diakses publik	Banyak data dan dokumentasi tersebar dan belum terkategori	Data dan dokumentsi belum tersedia maksimal	Pengumpulan informasi dari berbagi sumber baik dari institusi, TU, peneliti, penyuluh dan lainnya.

## VI. TENAGA DAN ORGANISASAI PELAKSANA

### Tenaga yang terlibat dalam kegiatan PPID BPTP Lampung

No	Nama/NIP	Jabatan dalam kegiatan	Uraian Tugas/ Fungsi	Alokasi Waktu (Jam/minggu)
1	Edwin Herdiansyah, SP	Penanggung Jawab RKTM/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan PPID BPTP Lampung	6
2	Tri Kusnanto, S.ST	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi	4
3	Dea Sylva Lisnandar, M.Si.	Fungsional/Pelaksana Dokumentasi/Arsip	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi	4
4	Betty Mailina, SP	Fungsional/Pelaksana Dokumentasi/Arsip	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi	4
5	Suryani, SST	Fungsional/Pelaksana Dokumentasi/Arsip	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi	4
6	Hestiana Karyati, A.Md	Pelaksana Dokumentasi/Arsip	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi	4
7	Desmarita Sari, SP, MM	Fungsional/Pelaksana Dokumentasi/Arsip	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi	4
8	Tika Nafiah Ramadhani	Pelaksana Dokumentasi/Arsip	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi	4
9				

## 2. Jadwal Waktu Kegiatan

No.	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Proposal	<b>X</b>	<b>X</b>										
2	Koordinasi Pelaksanaan		<b>X</b>	<b>X</b>									
3	Pelaksanaan Kegiatan	<b>X</b>											
4	Pelaporan											<b>X</b>	<b>X</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2003. Teknologi Informasi. Leaflet Balitbang Pertanian. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2004a. Layanan Komunikasi On-line Badan Litbang Pertanian. Leaflet Bahan Pelatihan Internet di Medan. Balitbang Pertanian. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2004b. Menuju Good Governance Melalui E-Government. Balitbang Pertanian. Jakarta
- Febrian J. 2005. Menggunakan Internet, Menjalankan Berbagai Aktivitas Internet Melalui E-Government. Balitbang Pertanian. Jakarta.
- Kadir, Abdul. 1999. Konsep dan Tuntuan Praktis Basis Data. Andi Offset. Yogyakarta.
- Kristanto, Harianto. 1994. Konsep dan Perancangan Database. Andi Offset. Yogyakarta.
- Purwanto, Edi. 2008. Pengantar World Wide Web. Diakses dari situs [www.goole.co.id](http://www.goole.co.id) (23 Februari 2009).